

**EFEKTIVITAS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)  
DALAM SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)  
DI KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR**

Risma Siswi Pradipta

NPP. 30.0843

*Asdaf Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur*

*Program Studi Keuangan Publik*

*Email: [rismasiswi@gmail.com](mailto:rismasiswi@gmail.com)*

Pembimbing Skripsi: Tumija, S.Pd., M.M.

**ABSTRACT**

**Problems Statement/Background (GAP):** The Regional Government Information System (SIPD) is an integrated and nationally integrated application. One of the benefits of SIPD is in regional financial management, especially in the preparation of a Work Plan and Budget (RKA) which is supported by various supports in it. But in operation there are still many problems encountered, both from internal and external of this system. The problems faced range from inadequate human resources, a system that often has problems, to the slow response from the Ministry of Home Affairs regarding problems with this system. **Purpose:** This study aims to determine the effectiveness of the preparation of the Work Plan and Budget (RKA) with the Regional Government Information System (SIPD) in the Madiun City Regional Financial and Asset Agency (BKAD), obtain information about inhibiting factors, as well as the efforts made by the Financial and Asset Agency Region (BKAD) Madiun City. **Method:** This study uses a qualitative descriptive research method with an inductive approach. The data collection technique is by using observation, interviews, and documentation. The steps taken are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Results:** From the research results it can be seen that the use of the Regional Government Information System (SIPD) in the preparation of the RKA (Work Plan and Budget) has been effective and efficient, because it really helps the Regional Government in financial management in the region. **Conclusion:** In practice there are still obstacles such as the quality and quantity of human resources managing the Regional Government Information System (SIPD), the system which sometimes has problems, and the telecommunication network which is often unstable. Because of this obstacle, the BKAD of Madiun City made various efforts to overcome it. Efforts are being made to continue to provide guidance and training for employees regarding the operation of the Regional Government Information System (SIPD), optimize the network, and always be active and act quickly in coordinating with the Ministry of Home Affairs when problems occur in this system. The suggestions from researchers are to increase the time for guidance and training related to the operation of the Regional Government Information System (SIPD), increase network capacity, and be

active in evaluating the implementation of the Regional Government Information System (SIPD).

**Keywords: Effectiveness, Work Plan and Budget, SIPD**

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan aplikasi terpadu dan terintegrasi secara nasional. Salah satu manfaat SIPD yaitu dalam pengelolaan keuangan daerah, terkhusus penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang didukung dengan berbagai penunjang didalamnya. Namun dalam pengoperasiannya masih banyak masalah yang dihadapi, baik itu dari internal maupun eksternal dari sistem ini. Masalah yang dihadapi mulai dari Sumber Daya Manusia yang belum memadai, sistem yang sering bermasalah, hingga lambatnya respon dari Kementerian Dalam Negeri dalam permasalahan sistem ini. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Madiun, mendapatkan informasi tentang faktor penghambat, serta upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Madiun. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Dari hasil penelitian yang dapat diketahui bahwa penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan (Rencana Kerja dan Anggaran) RKA sudah efektif dan efisien, karena sangat membantu Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan di daerah. **Kesimpulan:** Dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan seperti, kualitas dan kuantitas SDM pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sistem yang terkadang bermasalah, serta jaringan telekomunikasi yang sering tidak stabil. Karena adanya hambatan ini, maka BKAD Kota Madiun melakukan berbagai upaya untuk menanganinya. Upaya yang dilakukan adalah terus melakukan bimbingan dan pelatihan bagi pegawai mengenai pengoperasian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), mengoptimalkan jaringan, serta selalu aktif dan gerak cepat dalam berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri ketika terjadi masalah dalam sistem ini. Adapun saran dari peneliti yaitu menambah waktu bimbingan dan pelatihan terkait pengoperasian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), meningkatkan kapasitas jaringan, serta aktif dalam mengevaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

**Kata kunci : Efektivitas, Rencana Kerja dan Anggaran, SIPD**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi

pembangunan Daerah serta informasi keuangan Daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah. Dengan adanya Undang – Undang tersebut maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang merupakan perubahan aturan dari Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Alasan perubahan aturan Permendagri ini dianggap belum mampu dalam mengendalikan data pemerintahan daerah dalam satu sistem yang saling berkaitan.

Pemerintah Daerah Kota Madiun telah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah. Data keuangan daerah tersebut telah diintegrasikan secara elektronik melalui komputerisasi sejak tahun 2020 di setiap Perangkat Daerah (PD). Tujuan digunakannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yaitu untuk mengakomodir setiap instansi yang berada dibawah naungan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) di Kota Madiun untuk melakukan proses administrasi keuangan secara terpusat dengan menggunakan aplikasi yang sudah ada.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran karena sistem penyusunan dan pelaporan sangat transparan. Jika ada program yang mengalami kekurangan atau kelebihan anggaran, maka anggaran lebih tersebut akan dipindahkan ke program yang mengalami kekurangan anggaran. Jadi anggaran tersebut dirubah peruntukannya, ini disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan dilakukan sekali dalam setahun dan dilaksanakan pada pertengahan tahun. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi.

Namun kenyataan di lapangan, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini bersifat rigid atau bersifat tidak mudah berubah terutama pada pelaksanaan (RKA) yang dimana pelaksanaannya tidak sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) saat ini kembali pada sistem Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP), sedangkan mekanisme uang persediaan saat ini sudah menggunakan mekanisme Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD).

Konsep Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) berasumsi bahwa rencana berjalan sempurna, tidak akan meleset sedikitpun. Asumsi tersebut, diterjemahkan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan cara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) per kode rekening. Uang tunai dari pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut tidak dapat direalisasikan ke rekening lainnya. Konsep ini memaksa pelaksanaan program/kegiatan mengikuti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan bukan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) mengikuti program/kegiatan.

Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bertanggungjawab atas terlaksananya program/kegiatan, akan memprioritaskan pembayaran sesuai kondisi di lapangan. Hal ini sering mengakibatkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM). Sikap tersebut dibenarkan dari sisi tanggungjawab pelaksana anggaran. Hal ini berseberangan dengan tanggungjawab bendaharawan yang terfokus pada masalah keuangan. Bagi bendaharawan, kenyataan tersebut mengakibatkan tertundanya laporan.

Salah satu ciri dari good governance adalah responsif terhadap tuntutan perubahan. Dengan konsep Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD), pelaksana anggaran dapat memilih prioritas sepanjang tidak melebihi anggaran belanja dengan catatan anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah batas maksimal pengeluaran.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan efektivitas penyusunan Rencana Kerja dan anggaran (RKA) dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Dengan adanya SIPD proses perencanaan terutama pelaksanaan RKA terlalu *rigid* sehingga tidak sesuai dengan konsep UYHD sehingga perlu penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas dari SIPD dalam pengelolaan keuangan pada bidang perencanaan tersebut. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) saat ini kembali pada sistem Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP), sedangkan mekanisme uang persediaan saat ini sudah menggunakan mekanisme Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD).

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penelitian Laporan Akhir dari Athiya Rafiani (Rafiani, 2021) dimana dijelaskan mengenai kesiapan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Pagaralam adanya keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), sebagian proses penginputan laporan pengelolaan keuangan masih manual, kurangnya sumber daya finansial untuk memfasilitasi prasarana dan saran termasuk untuk modal perawatan dan server, adanya virus, penyajian informasi pengelolaan keuangan daerah belum dikemas dengan baik, keterbatasan sinyal. Penelitian Laporan Akhir dari Muhammad Zaky Harahap (Harahap, 2021) dimana dijelaskan mengenai evaluasi pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan good governance di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, bahwa ditemukan masih terjadinya kendala sehingga kegiatan pengelolaan keuangan menjadi terhambat di Kota Medan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah Kota Medan berkordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan melakukan evaluasi internal terhadap pengelolaan keuangan daerah. Jurnal dari Novianta (Novianta, 2021) dimana dijelaskan tentang implementasi penyusunan anggaran pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi bahwa hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jurnal dari Nidya Vitriana (Nidya Vitriana, 2022) dimana dijelaskan tentang analisis penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru menunjukkan bahwa belum optimal dan belum efektif.

## **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terkhusus efektivitas penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), pengukuran atau indikator yang digunakan berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori dari Duncan (Duncan dalam Steers, 1985) yang terdiri dari dimensi pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

### **1.5 Tujuan**

Mengetahui gambaran efektivitas penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Madiun dan mendapatkan informasi mengenai faktor apa saja yang menghambat efektivitas penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam mengatasi faktor penghambat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis efektivitas penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dari teori Duncan tentang efektivitas sistem dalam melakukan penelitian. Adapun dimensi efektivitas sistem informasi menurut Duncan (Steers 1985) adalah dimensi pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Menurut Siagian (2001:24) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya. Selanjutnya Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menurut Yani (2013:428–29) merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

### **3.1 Pencapaian**

Dalam mengukur keefektifan terdapat dimensi pencapaian tujuan memiliki indikator terfasilitasinya kebutuhan data dan informasi keuangan. Pada dasarnya informasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang mempunyai kewenangan. Pengambilan keputusan yang dilakukan tentunya sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Begitu pula data yang ada didalam sistem akan digunakan untuk menjadi bahan atau komponen untuk pertimbangan dan evaluasi pemerintahan daerah. Oleh karena itu informasi yang input

harus yang akurat, relevan, transparan, dan akuntabel. Masalah kevalidasian data dari SIPD ini cukup baik sebab didalamnya terdapat usulan rencana pembangunan dan penganggaran yang membutuhkan verifikasi dari penanggungjawab anggaran dan kegiatan sehingga penanggungjawab anggaran dan kegiatan harus meneliti sebelum melakukan verifikasi data sehingga data yang tersedia dapat dipertanggungjawabkan.

### 3.2 Integrasi

Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan Pusat yaitu Kementerian dalam Negeri untuk mengadakan sosialisasi dan komunikasi dengan Perangkat Daerah terkait Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

#### 1) Sosialisasi Sistem

Sosialisasi dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) kepada Perangkat Daerah yaitu dilakukan melalui Seminar, Workshop, dan/ Bimtek. Sosialisasi penerapan SIPD dilakukan secara berkala oleh Pusat. Sosialisasi diadakan berkala terutama ketika terdapat update aplikasi maupun perubahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam penggunaan aplikasi.

#### 2) Terdapat Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis

Saat *dilaunchingnya* Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini sampai dengan saat ini, belum ada video tutorial ataupun sosialisasi dan pembimbingan dan pelatihan resmi yang dilakukan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri. Selain itu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) atas nama pemerintah daerah juga membuat panduan untuk disebarakan disetiap organisasi perangkat daerah yang ada di Kota Madiun.



Gambar 3.1  
Website BKAD Kota Madiun tentang Panduan SIPD  
Sumber: BKAD Kota Madiun

### 3.3 Adaptasi

#### 1) Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Kelengkapan sarana dan prasarana BKAD Kota Madiun sendiri telah memenuhi standard untuk mendukung pelaksanaan SIPD ini mulai dari jaringan internet, komputer atau laptop, printer dan lain sebagainya. Walaupun Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini bertujuan untuk memudahkan, akan tetapi untuk tetap membutuhkan perangkat yang digunakan untuk mencetak dokumen-dokumen. Walaupun demikian, proses pencetakan dokumen juga dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja bahkan ketika posisi pengguna sedang tidak berada di kantor. Hanya perlu membuka sistemnya lalu mengcopy data tersebut ke dalam sebuah flashdisk lalu dicetak, Tentu hal ini sangat mempermudah pegawai maupun pejabat daerah yang melakukan perjalanan dinas.

## 2) Kemampuan dan Keterampilan Aparat

Penggunaan sistem informasi akan berjalan efektif dan efisien atau tidaknya tergantung pada penggunanya. Apabila penggunanya dapat menggunakan sesuai dengan prosedur maka penggunaan sistem akan berjalan secara efektif. Pengelola sistem ini di Kota Madiun saya anggap sudah mengetahui dan memahami, namun untuk berpindah pada suatu sistem yang baru pasti dibutuhkan sebuah penyesuaian dan pemahaman baru. Oleh karena itu kemarin kita sudah mengadakan pembimbingan dan pelatihan secara sekilas untuk para pengelola sistem. Kegiatan pelatihan ini saya serahkan ketim anggaran.



**Gambar 3.2**  
**Pelatihan Kemampuan dan Keterampilan Aparat dalam Pengoperasian SIPD**  
Sumber : Dokumentasi BKAD Kota Madiun

Keahlian sumber daya manusia sebagai pengelola keuangan daerah juga dapat dilihat dari pencapaian yang didapat oleh Kota Madiun. Kota Madiun termasuk mendapatkan urutan awal se-Provinsi Jawa Timur dalam penyelesaian perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu per -31 Desember 2022. Hal ini tentunya didapat karena kinerja dari pengelola yang baik ditambah koordinasi dan keselarasan masing-masing pengelola keuangan daerah yang memadai kemudian didukung oleh sistem yang mendukung.



**Gambar 3.3**  
**Tampilan Informasi Jadwal Penganggaran**

Sumber: BKAD Kota Madiun

### 3) Kesiapan Seluruh Unit Akuntansi dalam penerapan SIPD Instansi

Penerapan SIPD di Kota Madiun, tentunya membawa perubahan dan peningkatan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah baik dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan sistem ini dikontrol oleh Pemerintah Kota Madiun dengan membagi aspek pengelolaan sesuai dengan bidang masing-masing dan ditunjuk peran validator dan koordinator untuk dapat me-review data yang di input. Semenjak dikeluarkannya peraturan terkait SIPD ini, Pemerintah Daerah Kota Madiun segera mengambil langkah cepat untuk mengamati dan mempelajari bagaimana sistem ini berjalan agar dapat segera menyesuaikan dengan kebijakan yang ada. Aturan ini dikeluarkan pada tahun 2019 dan harus dilaksanakan pada tahun 2020. Melihat singkatnya waktu untuk penyesuaian ini, maka Pemerintah Daerah dalam hal ini BKAD langsung menyusun agenda di tahun 2020 untuk melakukan bimbingan dan pelatihan teknis untuk mempelajari sistem ini langsung dari pihak Kementerian Dalam Negeri.

### Faktor Penghambat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam SIPD di BKAD Kota Madiun

Adapun beberapa faktor penghambat dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yaitu:

1. Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
2. Sumber Daya Manusia
3. Lemahnya Koordinasi Antara Perangkat Daerah dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah
4. Jaringan Internet Yang Seringkali Mengalami Gangguan
5. Sulitnya Koordinasi dan Komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri



## **Upaya dalam Mengatasi Hambatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dalam SIPD di BKAD Kota Madiun**

Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan pembimbingan dan pelatihan di Kementerian Dalam Negeri selaku penyelenggara dan pembuat SIPD. Pesertanya adalah perwakilan setiap bidang anggaran Organisasi Perangkat Daerah di Kota Madiun, dan narasumbernya pihak dari Kementerian Dalam Negeri. Upaya yang dilakukan oleh BKAD Kota Madiun dapat dikatakan sudah maksimal, hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan seperti menyelenggarakan bimbingan dan pelatihan, perawatan perangkat keras (hardware), hingga perbaikan jaringan. Upaya ini dilakukan agar proses penyusunan RKA dapat berjalan dengan lancar, sehingga perencanaan dan penganggaran di Kota Madiun dapat terlaksana dengan baik.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Kenyataan di lapangan, SIPD ini bersifat rigid atau bersifat tidak mudah berubah terutama pada pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dimana pelaksanaannya tidak sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan. Penyusunan RKA saat ini kembali pada sistem Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP), sedangkan mekanisme uang persediaan saat ini sudah menggunakan mekanisme Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD).

Konsep Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) berasumsi bahwa rencana berjalan sempurna, tidak akan meleset sedikitpun. Asumsi tersebut, diterjemahkan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan cara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) per kode rekening. Uang tunai dari pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut tidak dapat direalisasikan ke rekening lainnya. Konsep ini memaksa pelaksanaan program/kegiatan mengikuti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan bukan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) mengikuti program/kegiatan.

Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bertanggungjawab atas terlaksananya program/kegiatan, akan memprioritaskan pembayaran sesuai kondisi di lapangan. Hal ini sering mengakibatkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM). Sikap tersebut dibenarkan dari sisi tanggungjawab pelaksana anggaran. Hal ini berseberangan dengan tanggungjawab bendaharawan yang terfokus pada masalah keuangan. Bagi bendaharawan, kenyataan tersebut mengakibatkan tertundanya laporan.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian lain yaitu pada teori yang digunakan, selain itu lokus yang digunakan juga berbeda dan fokus penelitian dikerucutkan pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berbeda dengan penelitian lain yang lebih bersifat umum.

## **IV. KESIMPULAN**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Madiun sudah berjalan dengan baik atau dapat dikatakan sudah efektif dan efisien.
2. Hambatan dalam penyusunan RKA OPD melalui SIPD terdapat beberapa faktor yaitu
  - a. Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
  - b. Sumber Daya Manusia
  - c. Lemahnya koordinasi antara Perangkat Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
  - d. Jaringan internet yang mengalami gangguan
  - e. Sulitnya koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri
3. Upaya BKAD Kota Madiun dalam menghadapi hambatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah dengan
  - a. Mengadakan sosialisasi penyelenggaraan dan menyebarkan panduan tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
  - b. Menyelenggarakan kegiatan pembimbingan dan pelatihan oleh Kementerian Dalam Negeri;
  - c. Meningkatkan koordinasi antara Perangkat Daerah lainnya terkhusus bidang anggaran dengan Badan Keuangan dan aset Daerah;
  - d. peningkatan kapasitas jaringan internet agar sistem dapat berjalan dengan baik dan efektif dari segi waktu
  - e. Terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar permasalahan sistem atau sistem error yang sering terjadi dapat teratasi sehingga proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dapat berjalan dengan baik dan lancar.

**Keterbatasan Penelitian:** Keterbatasan kemampuan dan waktu yang dimiliki penulis maka dilakukan pembatasan masalah agar tidak terjadi kekaburan dan kesimpangsiuran dalam pembahasan nantinya. Adapun dalam penelitian ini penulis memfokuskan permasalahan pada penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam lingkup perencanaan keuangan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Madiun Provinsi Jawa Timur

**Arah Masa Depan Penelitian (future work):** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sehubungan dengan penyusunan RKA OPD melalui SIPD, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya meningkatkan kapasitas jaringan di setiap lingkungan OPD khususnya pada Kantor BKAD Kota Madiun serta melakukan pemeliharaan

- terhadap fasilitas perangkat keras (hardware) yang mendukung dalam penyusunan RKA OPD melalui SIPD.
2. Seyogianya mengadakan penambahan waktu bimbingan teknis bagi admin dan segala unsur pengelola SIPD, serta seluruh pegawai agar meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam penggunaan SIPD sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam proses penginputan data dan membiasakan pengguna menggunakan sistem.
  3. Diharapkan penanggungjawab anggaran di masing-masing OPD lebih aktif untuk mengontrol, me-review, serta memvalidasi data. Sehingga data yang disajikan dan disusun memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi. Serta melakukan evaluasi per bulan terhadap penyelenggaraan SIPD. Jika dalam evaluasi ini ditemukan hambatan permasalahan yang sering terjadi ataupun permasalahan yang baru, maka bisa segera dikonsultasikan dan dikoordinasikan ke Pemerintah Pusat sehingga tidak terjadi penumpukan hambatan dan hambatan-hambatan yang ada tersebut bisa segera terselesaikan.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terimakasih ditujukan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik dan lancar. Kemudian kepada kedua orang tua yang selalu memberikan doa terbaiknya dan memberi dukungan dalam segala sesuatu yang dilakukan peneliti untuk kelancaran penelitian. Terimakasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menuntaskan penelitian ini. Terimakasih kepada seluruh pihak Badan keuangan dan aset Daerah (BKAD) Kota Madiun yang telah berkenan menjadi lokus penelitian dan meluangkan waktu untuk pelaksanaan penelitian ini. Serta terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kelancaran penelitian ini.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Harahap, Muhammad Zaky. 2021. "Evaluasi Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Untuk Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara." *IPDN*.
- Nidya Vitriana, Agustiawan, Muhammad Ahyaruddin. 2022. "Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru." *Unmuh Riau*.
- Novianta. 2021. "Implementasi Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah Dan Pembiayaan Daerah Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi." *Universitas Jambi*.
- Rafiani, Athiya. 2021. "Analisis Kesiapan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pagaralam." *IPDN*.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Steers. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Erlangga. Jakarta.

Yani, Ahmad. 2013. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

